Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) LANJUT USIA DI KECAMATAN MEDAN TIMUR

Afifah Azzahra[1], Husni Thamrin[2]

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : afifahazzahra703@gmail.com[1], pungkut@usu.ac.id id[2]

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan, termasuk lanjut usia, guna meningkatkan kesejahteraan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial dalam pelaksanaan PKH lanjut usia di Kecamatan Medan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga kelompok informan: pendamping PKH, lansia penerima manfaat, dan ketua kelompok penerima PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti individualisasi, penerimaan, keterlibatan emosional yang terkendali, sikap tidak menghakimi, penentuan nasib sendiri, ekspresi perasaan yang bertujuan, dan kerahasiaan telah diterapkan oleh pendamping sosial dalam proses pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti terbatasnya jumlah pendamping dibandingkan jumlah penerima manfaat, serta kurangnya pemahaman penerima terhadap hak dan kewajiban mereka. Studi ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran pekerja sosial dan peningkatan kapasitas pendamping PKH untuk mendukung kesejahteraan lansia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pekerja Sosial, Program Keluarga Harapan, Prinsip Pekerjaan Sosial, Lansia, Kemiskinan.

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a conditional cash transfer program initiated by the Indonesian government aimed at supporting poor and vulnerable families, including the elderly, by improving access to education, healthcare, and social protection. This study aims to analyze the implementation of social work practice principles within the PKH for the elderly in Medan Timur District. A qualitative descriptive method was used, with data collected through observation, interviews, and documentation involving three groups of informants: PKH facilitators, elderly beneficiaries, and a group leader of PKH recipients. The findings indicate that principles

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Krepa.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

such as individualization, acceptance, controlled emotional involvement, non-judgmental attitude, client self-determination, purposeful expression of feelings, and confidentiality were applied during the facilitation process. However, implementation faced challenges, including the limited number of facilitators compared to the beneficiaries and the beneficiaries' lack of awareness of their rights and responsibilities. This study highlights the need to optimize the role of social workers and enhance the capacity of PKH facilitators to sustainably improve elderly welfare.

Keywords*: *Social Workers, Family Hope Program, Social Work Principles, Elderly, Poverty.

PENDAHULUAN

Menurut Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: "Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial" (Kemensos, 2016).

Peserta PKH adalah masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu: memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar seperti SMP dan SMA, lansia, dan orang dengan disabilitas berat (Pedoman umum PKH 2021).

Gambar 1. 1 Skema Bantuan Program Keluarga Harapan Melalui Kementrian Sosial, 2024

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

SKEMA BANTUAN PKH		
Kategori Penerima	**Indeks/Tahun**	**Indeks/Tahap**
Ibu Hamil	Rp.3.000.000	Rp.750.000
Anak Usia Dini	Rp.3.000.000	Rp.750.000
Anak Sekolah SD	Rp.900.000	Rp.225.000
Anak Sekolah SMP	Rp.1.500.00	Rp.375.000
Anak Sekolah SMA	Rp.2.000.000	Rp.500.000
Lanjut Usia	Rp.2.400.000	Rp.600.000
Disabilitas Berat	Rp.2.400.000	Rp.600.000

Sumber: (Kementrian Sosial, 2024).

Lansia merupakan salah satu dari kelompok rentan. Keberadaan program kesejahteraan lansia menjadi penting agar lansia terjamin masa tuanya. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2024, terdapat 16,94 persen rumah tangga lansia yang tercatat sebagai penerima PKH (BPS, 2024).

Upaya peningkatan kesejahteraan lansia melalui program PKH menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2024, terdapat 16,94 persen rumah tangga lansia yang tercakup sebagai penerima PKH. Penurunan tingkat kemiskinan lansia sejalan dengan kenaikan persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH. Dalam subbab sebelumnya dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tingkat kemiskinan lansia turun menjadi 9,95 persen dari angka 10,04 persen di tahun 2023 (BPS, 2024).

Secara konseptual penanggulangan kemiskinan dapat melalui program jaminan sosial yang terdiri dari bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*). Delapan bantuan sosial, atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik (public assistance), dapat berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan sosial tanpa memperhatikan kontribusi atau premi dari penerima. Tunjangan kesejahteraan (*welfare benefits*) ini berlaku bagi keluarga miskin, jompo, dan anak terlantar yang masuk dalam bantuan sosial (Edi Suharto, 2008).

Mengutip data dari BPS 2024, persentase penduduk miskin Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin dibandingkan 2023 dan 0,54 persen poin dibandingkan 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang per tahun 2024, berkurang 0,68 juta orang dari

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

2023 dan 1,14 juta orang dari 2022. Sedangkan di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan pada tahun 2024 sebesar 7,94 persen (187,04 ribu jiwa). Persentase ini menurun 0,06 poin jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 8 persen.

Pekerja sosial merupakan kegiatan professional memperbaiki kemampuan mereka berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan. Siporin (1993) mendefinisikan tentang gaya praktisi pekerjaan sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas terapeutik dan merupakan cara untuk mengekspresikan kesenian kreatif praktisi. Makna dan fungsi gaya diperjelas. Gaya umum praktisi dianalisis sebagai kombinasi elemen gaya pribadi dan profesional, responsif terhadap kinerja tugas-tugas artistik dalam membantu klien. Presentasi kasus menggambarkan gaya khusus pekerja sosial. Pengaruh budaya yang lebih luas dari gaya praktisi juga pantas dikenali.

Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya pada (Ife & Tesoriero, 2008).

Zastrow menyatakan bahwa pelayanan sosial akan lebih berhasil dan efektif dengan model pendekatan ekologis, pada hakekatnya sasaran pelayanan pekerjaan sosial tidak hanya mengarah pada permasalahan individu, kelompok, atau masyarakat, tetapi menjangkau luas kepada sistem keluarga, sistem politik, sistem ketenagakerjaan, sistem keagamaan, sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya (Zastrow, 1978). Penanganan masalah sosial melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan, pekerja sosial harus memperhatikan keterkaitan beberapa unsur yaitu manusia, organisasi, komunitas sumber, serta kebijakan sosial.

Menurut data BPS, jumlah penduduk Kecamatan Medan Timur per tahun 2024 berjumlah 117.035 jiwa, berkurang 0,82 persen dari tahun 2023 yang berjumlah 118.008 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia menurut BPS di kecamatan Medan Timur berjumlah 817 orang (BPS, 2024). Kecamatan Medan Timur dijadikan tempat penelitian dikarenakan jumlah pendamping PKH hanya berjumlah empat orang, dibandingkan oleh jumlah penerirma PKH secara keseluruhan adalah 1434 orang, dengan penerima PKH lansia yang berjumlah 719 orang. Peneliti ingin melihat apakah pemberian bantuan PKH di Kecamatan Medan Timur tersebut apakah sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip pekerjaan sosial.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Melihat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini sebagai "Penerapan Prinsip-Prinsip Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Lanjut Usia di Kecamatan Medan Timur".

METODE PENELITIAN

Dalam Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Medan Timur. Peneliti memfokuskan penelitian di tempat masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut, khususnya penerima lanjut usia.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016), *purposive sampling* adalah teknik penentuan data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah informan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, ada tujuh informan yang telah terpilih, yaitu:

1. Informan kunci
   Informan kunci pada penelitian ini adalah tiga orang pekerja sosial yang menangani PKH di Kecamatan Medan Timur yang mengetahui jumlah penerima bantuan PKH dan kondisi objektif di lapangan.
2. Informan utama
   Informan utama pada penelitian ini adalah tiga masyarakat lanjut usia penerima bantuan PKH di Kecamatan Medan Timur.
3. Informan pendukung
   Informan pendukung pada penelitian ini adalah seorang ketua kelompok dari penerima bantuan PKH di Kecamatan Medan Timur.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancarara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *International Federation of Social Worker* (DuBois dan Miley, 2005:4) pekerjaan sosial (*social work*) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem social, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam definisi yang lain pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas professional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuan (Zastrow, 1999:5).

Pada penelitian ini, setelah dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diolah bersama teori yang ada, peneliti menemukan bahwa para pekerja sosial atau pendamping sosial yang berada di Kecamatan Medan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial saat mereka mendampingi para penerima bantuan PKH. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial telah mereka terapkan dengan pendekatan yang berbeda sesuai konteks permasalahan yang dihadapi penerima bantuan, terutama pada penerima lanjut usia. Saat informan kunci I, II dan III diwawancarai, mereka mengakui bahwa tugas mereka adalah membantu para penerima bantuan PKH untuk mendapatkan haknya. Bukan hanya untuk mendapatkan haknya saja, tetapi mereka juga memastikan bahwa para penerima dapat menyelesaikan masalah mereka melalui pendampingan sosial yang dilakukan oleh para pendamping, dengan melalui komunikasi dan hubungan yang bermakna, para pendamping dapat membantu para penerima PKH untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Dari hasil wawancara mendalam dengan tiga informan kunci, terlihat bahwa tujuh prinsip pekerjaan sosial telah diterapkan secara konsisten oleh para pendamping PKH di Kecamatan Medan Timur. Namun, mereka menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang memengaruhi efektivitas pendampingan. Untuk mencapai tujuan PKH dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, dibutuhkan komitmen lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, dan penataan ulang strategi pemberdayaan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif.

Prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial menurut Guzman meliputi:

1. Individualisasi**.** Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu adalah unik dan harus diperlakukan sebagai pribadi yang berbeda, dengan karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang masing-masing. Ketiga informan (Pak Budi, Bu Lolly, dan Bu Yuna) sepakat dan secara eksplisit menjelaskan bahwa mereka sangat memperhatikan prinsip individualisasi. Mereka tidak memperlakukan seluruh

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

penerima bantuan secara seragam, melainkan berdasarkan kondisi masing-masing individu atau keluarga yang didampingi. Lansia, misalnya, mendapat prioritas karena kondisi fisik dan sosial yang lebih rentan.

a. Informan kunci mengatakan bahwa contoh penerapan dari prinsip ini adalah para pendamping tidak menyamaratakan pendampingan mereka kepada semua penerima, melainkan dilihat dari sifat dan karakter masing-masing individu agar pendampingan yang dilakukan berjalan lebih maksimal. Contohnya dalam melakukan dampingan kepada lansia, para pendamping melakukan pendampingan dengan melihat apakah lansia tersebut sudah retan dan tidak memiliki keluarga, jika dalam kasus tersebut, para pendamping akan melakukan pendampingan dengan cara mendatangi rumah penerima untuk menginformasikan seputar tentang bantuan PKH, apakah bantuannya sudah keluar apa belum.
b. Informan utama dan tambahan mengatakan bahwa para pendamping sangat membantu mereka karena mereka tidak hanya semata-mata bekerja professional saja, melainkan sangat membantu para penerima dalam penerimaan bantuan PKH karena para pendamping tidak menyamaratakan pendampingan, melainkan melihat dari kondisi para penerima dan bagaimana cara melakukan pendampingan yang tepat untuk mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

2. Penerimaan. Prinsip ini menuntut pekerja sosial untuk menerima klien tanpa syarat, terlepas dari latar belakang, kondisi sosial, atau masalah yang dihadapi. Seluruh informan menyampaikan bahwa sebagai pendamping PKH, mereka dituntut untuk memiliki sikap terbuka dalam menerima berbagai masalah klien.
   a. Informan kunci menjelaskan bahwa dalam penerapan prinsip ini, para pendamping menerima semua latar belakang dari penerima PKH, misalkan memiliki latar belakang kriminal. Mereka mengatakan bahwa ada seorang lansia yang pernah latar belakang kriminal dan kini hidup sendiri. Pendamping PKH tetap memperlakukannya dengan hormat, tanpa prasangka atau diskriminasi. Ia tetap dimasukkan dalam kelompok penerima manfaat, didampingi secara layak, dan dilibatkan dalam pertemuan kelompok PKH.
   b. Informan utama dan tambahan mengatakan bahwa para pendamping sangat menerima kondisi mereka walaupun mereka dari lata belakang orang yang tidak mampu. Para pendamping senantiasa membantu mereka dalam pendampingan PKH tanpa mengharapkan imbalan apapun dan menerima semua latar belakang mereka.

3. Keterlibatan emosional yang terkendali. Prinsip ini menekankan bahwa pekerja sosial harus mampu menunjukkan empati tanpa larut dalam masalah klien. Informan mengungkapkan bahwa tantangan

emosional sering terjadi, terutama saat klien meluapkan emosi terkait keterlambatan bantuan atau masalah keluarga.

a. Informan kunci menjelaskan bahwa sering sekali para penerima menangis saat menyampaikan keluhannya kepada pendamping karena merasa kesepian dan ditinggal anak-anaknya. Pendamping menunjukkan empati dengan mendengarkan dan memberi dukungan emosional, namun tetap menjaga profesionalisme dan tidak larut secara emosional, agar tetap bisa fokus pada tujuan intervensi mereka.
b. Informan utama dan tambahan menjelaskan bahwa mereka sering sekali bercerita tentang masalah mereka kepada para pendamping, tetapi tidak pernah sekali ikut larut dalam emosi yang mereka rasakan. Para pendamping tetap bersikap netral dalam memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi oleh para penerima.

4. Sikap tidak menghakimi. Prinsip ini mengharuskan pekerja sosial tidak memberikan penilaian moral terhadap klien. Para pendamping menekankan bahwa mereka harus menjaga sikap profesional dan objektif dalam mendampingi para penerima.

a. Informan Kunci mengatakan tidak jarang para penerima menceritakan masalah pribadi mereka, terutama masalah keluarga dan rumah tangga mereka. Mereka terkadang menceritakan bahwa penerima dan pasangan mereka sedang bertengkar, para pendamping tetap bersikap netral dan tidak menghakimi masalah mereka dan tetap mendengarkan cerita dari para penerima tersebut.
b. Informan utama dan tambahan menyatakan bahwa para pendamping tidak pernah menghakimi mereka apapun masalah yang mereka ceritakan. Contohnya pernah ada seorang penerima yang mengadu kepada pendamping bahwa jumlah bantuan PKH nya berkurang dan meminta solusi kepada pendamping, tetapi pendamping tidak menghakimi sang penerima tersebut dan mencari akar masalah yang ternyata dana berkurang tersebut sudah diambil oleh anggota keluarganya terlebih dahulu.

5. Penentuan nasib klien sendiri. Prinsip ini berarti pekerja sosial menghargai hak klien untuk membuat keputusan sendiri setelah mendapatkan informasi dan bimbingan. Ketiga informan sepakat bahwa mereka hanya berperan sebagai pendamping, bukan sebagai pengambil keputusan atas hidup klien.

a. Informan kunci menjelaskan dalam penerapan prinsip ini, yang berhubungan dengan penerimaan bantuan PKH, setelah para pendamping melakukan sosialisasi atau memberi informasi tentang bantuan PKH dan menyarankan mereka untuk menggunakan bantuan

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

tersebut dengan semestinya, para pendamping pada akhirnya akan menyerahkan kepada penerima itu sendiri bagaimana mereka akan menggunakan bantuan itu karena pada akhirnya penerima lah yang menentukan nasib mereka sendiri.

b. Informan utama dan tambahan menjelaskan bahwa setiap dilakukan sosialisasi benar bahwa para pendamping selalu mengingatkan para penerima untuk memanfaatkan bantuan PKH tersebut secara bertanggung jawab, namun padaa akhirnya mereka mengatakan bahwa para pendamping tidak pernah melarang mereka jika bantuan PKH tersebut digunakan diluar dari kebutuhan karena para pendamping telah membebaskan penerima untuk menentukan nasib mereka sendiri.

6. Ekspresi perasaan yang bertujuan. Prinsip ini mendorong klien untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan tujuan yang membangun. Seluruh informan menyebutkan bahwa mereka memberi ruang bagi penerima untuk menyampaikan keluh kesah mereka, terutama dalam pertemuan bulanan kelompok.

   a. Informan kunci menjelaskan dalam penerapan ini contohnya dalam pertemuan kelompok bulanan yang difasilitasi oleh pendamping PKH, para penerima diberi ruang untuk menyampaikan unek-uneknya secara terbuka. Pendamping tidak hanya mendengarkan, tetapi juga membimbing para penerima untuk menyampaikan keluhan tersebut dengan cara yang tepat dan diarahkan pada solusi, bukan sekadar pelampiasan emosi. Contohnya jika ada yang kesulitan dalam pencairan dana PKH, para pendamping akan mendengarkan keluhan tersebut dan segera mencari solusi agar pencairan dana penerima tersebut bisa menjadi mudah.
   b. Informan utama dan tambahan menjelaskan, setiap keluh kesah yang mereka sampaikan pada pendamping dan tidak jarang ada juga penerima yang tersulut emosi, namun para pendamping tetap sabar dalam mendengarkan mereka dan menenangkan mereka agar bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh penerima, khususnya jika bantuan yang diberikan terlambat.

7. Kerahasiaan. Pekerja sosial berkewajiban menjaga informasi pribadi klien agar tidak bocor atau disalahgunakan. Ketiga informan mengakui pentingnya menjaga kerahasiaan sebagai bentuk profesionalisme dan etika kerja.

   a. Informan Kunci menjelaskan dalam prinsip ini mereka menerapkan bahwa segala permasalahan yang diceritakan oleh penerima merupakan hal yang rahasia yang tidak akan mereka ceritakan kepada siapapun. Contohnya ketika ada penerima yang menceritakan masalah

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

pribadinya, para pendamping tidak akan menyebarkan cerita tersebut kepada penerima lain melainkan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh si penerima. Para pendamping juga sangat merahasiakan biodata dari penerima PKH dan tidak sembarangan memberikan data tersebut kepada masyarakat awam.

b. Informan utama dan tambahan menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada pembicaraan antar penerima atas masalah mereka yang sudah mereka ceritakan kepada para pendamping, hal itu menunjukkan bahwa para pendamping benar-benar menerapkan prinsip kerahasiaan sehingga masalah yang sudah mereka ceritakan kepada para pendamping tidak pernah tersebar oleh para penerima lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Timur, disimpulkan bahwa ketujuh prinsip utama dalam praktik pekerjaan sosial telah diterapkan secara nyata dalam kegiatan pendampingan.

1. Prinsip indvidualisasi, terlihat dari upaya para pendamping untuk menyesuaikan pendekatan terhadap setiap penerima bantuan sesuai dengan latar belakang, kondisi fisik, serta kebutuhan sosial dan ekonomi masing-masing. Kelompok rentan seperti lansia menjadi prioritas, karena keterbatasan mereka dalam mengakses informasi dan fasilitas publik.
2. Prinsip penerimaan, tercermin dari kesiapan pendamping dalam menerima segala permasalahan yang dihadapi klien, tanpa prasangka, dan tanpa mempermasalahkan status sosial, pendidikan, ataupun kondisi keluarga klien. Mereka membuka ruang bagi penerima manfaat untuk merasa diterima secara utuh sebagai individu yang sedang menghadapi kesulitan hidup.
3. Prinsip keterlibatan emosional yang terkendali, juga menjadi prinsip yang penting dalam menjaga profesionalisme, di mana pendamping menunjukkan simpati dan empati namun tetap menjaga batasan emosional agar tidak terlarut dalam permasalahan klien.
4. Prinsip tidak menghakimi, para pendamping berkomitmen untuk menjaga objektivitas dan tidak menilai klien berdasarkan asumsi atau penampilan luar. Banyak kasus di mana penerima terlihat mampu secara materi, namun tetap diverifikasi melalui prosedur validasi yang sesuai.
5. Prinsip penentuan nasib sendiri, ditegakkan melalui peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan saran dan informasi, namun tetap memberikan kebebasan kepada klien dalam mengambil keputusan atas hidupnya.
6. Prinsip ekspresi perasaan yang bertujuan difasilitasi secara rutin, khususnya dalam forum pertemuan kelompok bulanan, tempat di mana klien dapat menyampaikan keluhan maupun harapan mereka, terutama terkait keterlambatan penyaluran bantuan.

7. Prinsip kerahasiaan dijaga secara ketat oleh para pendamping sebagai bagian dari prinsip pekerjaan sosial, terutama ketika klien menyampaikan masalah pribadi, rumah tangga, atau kesehatan. Meskipun banyak tantangan seperti keterbatasan jumlah pendamping, sulitnya komunikasi dengan lansia, serta tingginya beban administratif, para pekerja sosial ini tetap menunjukkan integritas dan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip etis dan profesional dalam pekerjaan sosial.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip pekerjaan sosial dalam pendampingan PKH, disarankan agar pemerintah meningkatkan jumlah tenaga pendamping agar rasio antara pendamping dan penerima lebih seimbang, sehingga prinsip-prinsip pekerjaan sosial bisa dijalankan secara optimal.
2. Disarankan pada peneliti lain yang ingin meneliti terkait penelitian yang sama, agar tidak hanya memfokuskan pada penerima lanjut usia saja, bisa meneliti secara umum kepada seluruh penerima bantuan PKH seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah SD, SMP, SMA, dan orang dengan disabilitas berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Haris, A. M. (2023). *Pengantar Metode Praktik Pekerjaan Sosial.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Roberts, A., & Greene, G. J. (2009). *Buku Pintar Pekerja Sosial* (2nd ed.). (J. Damanik, & C. Pattiasina, Trans.) Jakarta: Gunung Mulia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik* (4th ed.). Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Andari, S. (2020). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 92-113.

Beni, S., & Manggu, B. (2020). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERBATASAN (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Jurnal Sosio Konsepsia*, 162-170.

Bolung, D. S. (2022). Analisis Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan pada Masa Pandemi. *Jurnal Equilibrium*, 64-67. Retrieved from http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3490

Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. *Jurnal Ilmu Sosial*. doi:https://doi.org/10.22202/mamangan.2580

Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Poor Families: A Case Study. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Hidayat, B. W., Nuryadi, M. H., & Rusnaini. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PEMENUHAN HAK SOSIAL WARGA LANSIA MISKIN (STUDI DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA). *PKn Progresif*, 15-28.

Humairoh, S. (2021). DINAMIKA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEKERJAAN SOSIAL DALAM UPAYA MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 10*, 67-77. doi:https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.19700

Kiwang, A. S. (2018). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Kupang. *Journal of Politics and Policy*, 18-31.

Komalasari, D., & Nugroho, F. (2023). PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENCAPAI GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI (STUDI PADA PENDAMPING SOSIAL DENGAN LATAR BELAKANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN NONKESEJAHTERAAN SOSIAL). *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17*, 10-26. doi:10.35931/aq.v17i5.2632

Nandini, R. (2020). Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4*(1).

Ocktilia, H. (2024). Kapabilitas Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi Keluarga Harapan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, 25-37.

Putri, N. P., Sajiwo, R. G., & Farikhah, K. (2024). Peran Pekerja Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Candirejo Semarang. *Islamic Management and Empowerment Journal, 6*, 101-114. doi:10.18326/imej.v6i1.101-114

Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 1*(2). doi:https://doi.org/10.15294/jnece.v1i2.16271

Rifqatuss'adah, Shafira, A. A., Fathonah, D., Yasinta, N., Putri, M. T., & Bakkuru, Y. C. (2022). KUALITAS HIDUP LANJUT USIA PADA MASA PANDEMI COVID 19. *Seminar Nasional Riset Kedokteran (SENSORIK)*, 41-49.

Santoso, M. B., Irfan, M., & Nurwati, R. N. (2020). TRANSFORMASI PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL MENUJU MASYARAKAT 5.0. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 170-183.

Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1-10.

Siregar, A., Sufiawan, N. A., & Saibah, B. R. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PAYAKUMBUH. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 52-68.

Web:

BPS. (2024, March). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Retrieved from Berita Resmi Statistik.

BPS (2024). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024* (Vol. 21). Badan Pusat Statistik. Retrieved March 27, 2025

Kementrian Sosial. (2009). *Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Retrieved December 1, 2024, from https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOSNo11-2009.pdf

Kementrian Sosial. (2016). *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial).* Retrieved December 1, 2024, from Kementrian Sosial RI.